HAK KONSUMEN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI KANDUNGAN BAHAN DAN SUBSTITUSI DALAM INFORMASI KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN

Parlindungan Suryanto, Wiwik Sri Widiarty, Binoto Nadapdap
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
Email: parlindungan.suryanto@gmail.com

Abstrak

Industri makanan dan minuman dalam kemasan merupakan salah satu sektor ekonomi yang signifikan di berbagai negara di seluruh dunia. Makanan dan Minuman dalam kemasan memiliki daya tarik yang besar bagi konsumen dari berbagai kalangan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum atau legal research. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap peredaran bahan makanan yang tidak sesuai label adalah melanggar Pasal 8 UUPK, yaitu: (1). Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa. Pengawasan terhadap aturan pencantuman kandungan bahan substitusi dalam pangan kemasan merupakan salah satu faktor kunci yang memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap peredaran pangan kemasan di pasar, terutama dalam konteks keamanan dan kualitas produk.

Kata Kunci: konsumen, kandungan, makanan dan minuman

Abstract

The packaged food and beverage industry is one of the significant economic sectors in various countries around the world. Packaged food and beverages have a great attraction for consumers from various walks of life. The type of research used is normative juridical, or known as legal research. Violations committed by business actors against the circulation of food ingredients that do not comply with the label are violations of Article 8 of the UUPK, namely: (1). Business actors are prohibited from producing and/or trading goods and/or services. Supervision of the rules for the inclusion of substitution ingredients in packaged food is one of the key factors that provide protection to consumers against the circulation of packaged food in the market, especially in the context of product safety and quality.

Keywords: consumer, content, food and beverage

PENDAHULUAN

Industri makanan dan minuman dalam kemasan merupakan salah satu sektor ekonomi yang signifikan di berbagai negara di seluruh dunia (Amalia & Purnamasari, 2023; H. I. Putri, 2023; UTAMA, 2023). Makanan dan Minuman dalam kemasan memiliki daya tarik yang besar bagi konsumen dari berbagai kalangan (Maulana, 2024; Simanjuntak, 2018). Namun, seiring dengan pertumbuhan industri ini, muncul pula berbagai tantangan dan risiko yang perlu diatasi, terutama dalam konteks perlindungan konsumen terhadap kandungan bahan dan substitusi yang tercantum dalam label kemasan makanan dan minuman ketika diperjualbelikan di pasar atau didistribusikan kepada konsumen (Sumarno & Susilo, 2022; Widiarty, 2024).

Kebutuhan Konsumen terhadap berbagai macam produk kemasan disisi lain menimbulkan celah dan kelemahan dari konsumen itu sendiri, untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan tujuan agar ada landasan bagi konsumen dan juga lembaga perlindungan konsumen melindungi kepentingan konsumen serta memberikan kewajiban bagi produsen untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam memasarkan produknya (Sinulingga et al., 2023).

Pertama, penting untuk diakui bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai produk yang mereka beli (Mewu & Mahadewi, 2023; Ratiwi et al., 2024). Label wajib memberikan informasi tentang *ingredients*, kandungan bahan utama, kandungan bahan substitusi komposisi, dan instruksi penggunaan haruslah akurat dan mudah dimengerti oleh semua konsumen. Informasi tidak akurat atau menyesatkan dapat membahayakan kesehatan dan keamanan konsumen (Kusumawardani et al., 2018; Pandie & Aloysius, 2024).

Kedua, perlindungan terhadap konsumen juga melibatkan penanganan masalah Kesehatan terutama berkaitan dengan konsumsi kandungan tertentu atau bahan substitusi yang digunakan dalam perasa dan perisa makanan. Konsumsi salah satu bahan tertentu atau sebut saja substisusi kimia tertentu atau alergen tertentu dapat menimbulkan efek langsung dan tidak langsung kepada konsumen apalagi jika dikonsumsi berlebihan dan rutin dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit hati, penyakit jantung, dan masalah mental. Konsumen perlu dilindungi dari risiko kesehatan ini melalui edukasi, pencegahan, dan akses ke layanan kesehatan harus memadai.

Pemasangan Label dan informasi bahan makanan dan minuman sesuai keterangan bahan sebenarnya pada seluruh produk makanan dalam kemasan, seperti informasi kualitas kandungan gizi, mutu, keamanannya (Safitri, 2019). Kemasan maupun sering disebut embalase berisi informasi tentang produk dalam kemasannya harus memiliki data yang presisi tentang kandungan bahan dan keteraangan gizi komposisi, gizi, serta kadaluarsa produk. Dengan ini informasi mengenai produk barang dalam kemasan harus sesuai informasi tepat sesuai dengan yang tercantum pada kemasannya, untuk takarannya seperti adanya kekurangan di dalam isinya maka akan menjadi keuntungan bagi pelaku usaha, adapun riesiko yang terjadi akan merugikan konsumen karena jelas yang terjadi pada kemasan tidak sesuai dengan pada isi di dalamnya. Produk makanan baru dan komposisi tidak benar yang akan dijual oleh pelaku usaha yang memikirkan strategi pemasaran dalam melihat suatu peluang usaha dalam masyarakat, produk makanan yang tidak memiliki komposisi yang benar atau lengkap dapat mengakibatkan kerugian yang akan dirasakan oleh konsumen untuk jangka Ppanjang yang akan berimbas kepada kesehatan dari konsumen, yang harus diperhatikan dan juga dijaga, dengan adanya penambahan yang berbeda dari komposisi yang disajikan akan menjadi suatu kerugian yang mendalam bagi konsumen, keamanan produk makanan yang dikonsumsi konsumen sangat peting di ketahui nilai gizi dan kualitasnya.

Kedua, perlindungan terhadap konsumen juga melibatkan penanganan masalah kesehatan berkaitan dengan konsumsi produk yang tidak sesuai dengan anjuran (Lubis & Tarina, 2023; Priaji, 2018; A. Putri & Mula, 2024). Konsumsi masyarakat yang berlebihan terhadap suatu produk mengandung bahan substitusi atau *ingredients* tertentu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit hati, penyakit jantung, diabetes dan masalah kesehatan lainnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dengan mengkaitkan melihat fakta-fakta yang diuraikan dalam latar belakang dengan rincian terkait permasalahan membuat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat aturan yang mengatur pencatuman bahan substitusi di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi bahan substitusi dalam produk kemasan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai standar hukum pencatuman bahan substitusi dalam produk kemasan ambang batas terkait dengan batas bahan substitusi dan jumlah kandungan di dalam produk makanan kemasan yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia,
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai upaya-upaya pemerintah apabila terdapat produk makanan impor yang mengandung melamin dan beredar luas di masyarakat

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum atau legal research. Pengertian Legal Research disini adalah memahami dan menganalisis peraturan, doktrin hukum, serta keputusan-keputusan pengadilan. Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah hukum, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, Penelitian hukum normative biasanya “hanya” merupakan studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, Keputusan ketetapan pengadilan. Terori hukum dan pendapat para sarjana.

Menurut Soerjono Sukanto, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Metode dalam penelitian hukum normatif adalah untuk mencari kaedah adalah metode penemuan hukum, antara lain adalah penafsiran, argumentasi, dan sebagainya.

Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini meliputi pendekatan Undang-Undang (*statute research*) dan pendekatan konseptual (*conceptual research*). Dalam pendekatan Undang-Undang, penulis akan meneliti dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan topik penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup berbagai regulasi penting seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta beberapa undang-undang spesifik terkait perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan juga menjadi bahan kajian utama.

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, Data Sekunder memiliki pengertian yaitu tulisan atau hasil penelitian orang lain. Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian tesis ini terdiri dari (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa sumber sumber materiil hukum meliputi undang- undang dan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
- 6) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 39 Tahun 2023 tentang Label dan Iklan Pangan
- 7) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 7 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penanganan Keamanan Pangan;

- 8) Pedoman Label Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Tahun 2020;
- 9) Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food additives;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari buku-buku teks mengenai perlindungan konsumen, tulisan-tulisan tentang peraturan label makanan, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus kimia, Ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik dan cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Studi literatur (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari undang-undang, peraturan perundangan lain, buku hasil karya kalangan hukum, hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah

5. Teknik Analisa Data

Setelah melakukan pengumpulan data maka tahapan selanjutnya dalam penelitian hukum adalah melakukan analisis mendalam terhadap permasalahan yang dibahas dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan berlaku serta menghubungkannya dengan data lain yang relevan. Dalam tahap ini, peneliti akan menelaah bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam konteks masalah yang sedang diteliti dan bagaimana interaksi antara berbagai sumber hukum, baik primer maupun sekunder, dapat menjelaskan isu hukum yang dihadapi. Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan argumentasi yang kuat, serta mengembangkan teori atau konsep baru yang dapat memberikan solusi terhadap masalah hukum yang dibahas. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum, serta evaluasi terhadap implementasi dan pengawasan regulasi yang ada. Selanjutnya, untuk menarik kesimpulan, peneliti akan menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengorganisir temuan-temuan dari analisis yang dilakukan dan memberikan preskripsi yang jelas tentang langkah-langkah yang seharusnya diterapkan dalam menangani permasalahan terkait. Preskripsi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan hukum yang dihadapi, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan atau penegakan hukum yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Perundang - Undangan Yang Mengatur Tentang Perlindungan Konsumen Dibidang Pangan

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap peredaran bahan makanan yang tidak sesuai label adalah melanggar Pasal 8 UUPK, yaitu: (1). Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang tersebut

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal", sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

Pelanggaran terhadap standar kelayakan dan keamanan peredaran makanan di Indonesia mencakup berbagai aspek penting yang harus diperhatikan oleh produsen dan distributor. Salah satu pelanggaran utama adalah ketidaksesuaian ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah yang tertera pada label dengan kondisi sebenarnya, yang dapat menimbulkan kekecewaan bagi konsumen dan mengurangi kepercayaan terhadap produk. Selain itu, produk yang tidak memenuhi kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran yang dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa menjadi masalah serius, karena dapat menyesatkan konsumen tentang kualitas dan manfaat produk. Ketidakcocokan dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam label juga menjadi pelanggaran yang merugikan.

Lebih lanjut, tidak menepati janji yang diungkapkan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan produk menciptakan ketidakpuasan di kalangan konsumen. Kewajiban untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan yang terbaik pada produk juga sangat penting, karena ini berhubungan langsung dengan keamanan dan kesehatan konsumen. Pelanggaran lainnya termasuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan berproduksi secara halal, yang harus sesuai dengan pernyataan "halal" pada label. Selain itu, tidak adanya label atau penjelasan yang memuat informasi penting, seperti ukuran berat atau isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, serta nama dan alamat pelaku usaha, sangat merugikan konsumen yang berhak mendapatkan informasi yang jelas. Semua aspek ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi sangat penting untuk menjamin bahwa produk makanan yang beredar aman, berkualitas, dan sesuai dengan yang dijanjikan kepada konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan komitmen untuk melindungi hak-hak konsumen, terutama dalam konteks kesehatan. Salah satu aspek krusial yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak konsumen atas kesehatan, yang dapat terpenuhi melalui konsumsi makanan dan minuman yang aman, sehat, serta bebas dari bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia.

a. Hak atas Kesehatan

Hak atas kesehatan, sebagai bagian dari hak-hak konsumen, mencakup jaminan bahwa setiap individu berhak untuk mengakses makanan dan minuman yang tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga tidak mengandung zat berbahaya yang dapat menimbulkan risiko

kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi produsen untuk bertanggung jawab dalam menyediakan produk yang aman dan berkualitas, serta bagi pemerintah untuk menerapkan regulasi yang mendukung perlindungan konsumen.

b. Pengaturan dalam UU Kesehatan

Pasal 146 Bagian 1:

Setiap Orang yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Pengamanan Makanan dan Minuman:

Pasal ini menggarisbawahi pentingnya pengamanan makanan dan minuman untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan persyaratan kesehatan. Upaya ini merupakan bagian integral dari perlindungan konsumen, dan mencakup serangkaian langkah yang harus diambil oleh pihak terkait.

2) Kewajiban Pencantuman Label yang benar:

Pasal 147 ayat 1 Setiap Orang yang memproduksi makanan dan minuman dilarang memberikan informasi atau pernyataan yang tidak benar dan/ atau menyesatkan pada informasi Pasal 147 ayat 2 Setiap Orang dilarang mempromosikan produk makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan informasi produk.

Pasal 147 ayat 3 Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Standar Kualitas dan Keamanan:

Undang-Undang Kesehatan mengatur bahwa makanan dan minuman yang beredar di masyarakat harus memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan. Ini termasuk pengawasan terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam produksi, serta proses pengolahan yang aman.

Dampak dan Pentingnya Pengaturan

Regulasi dalam Undang-Undang Kesehatan ini memberikan landasan yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai pengamanan makanan dan minuman, diharapkan dapat mencegah peredaran produk yang tidak aman, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk yang memenuhi standar kesehatan. Dengan mengedepankan hak atas kesehatan melalui pengaturan yang komprehensif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berperan penting dalam melindungi konsumen dari risiko yang terkait dengan konsumsi pangan. Kewajiban pencantuman label kadaluwarsa dan pengawasan terhadap standar kesehatan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya menciptakan lingkungan konsumsi yang aman dan sehat bagi masyarakat.

Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:

- 1) bahan yang dipakai;
- 2) komposisi setiap bahan;
- 3) tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
- 4) ketentuan lainnya.

Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengatur berbagai aspek penting terkait produksi, distribusi, dan perdagangan pangan di Indonesia. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat serta menjamin keamanan dan

kualitas pangan yang beredar di pasar. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap kegiatan atau proses produksi pangan yang akan diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi sejumlah ketentuan yang sangat krusial. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengatur Kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan tentang sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, residu cemaran, dan kemasan pangan. Hal lain yang patut diperhatikan oleh setiap orang yang memproduksi pangan adalah penggunaan metode tertentu dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan perlu dibebani tanggung jawab, terutama apabila pangan yang diproduksinya menyebabkan baik kerugian pada kesehatan manusia maupun kematian orang yang mengkonsumsi pangan tersebut. Berdasarkan Undang- Undang Pangan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap peredaran daur ulang makanan kadaluwarsa telah melanggar:

- a. Pasal 67 ayat (1) Undang- Undang Pangan, yaitu Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat
- b. Pasal 67 ayat (2) Undang- Undang Pangan yaitu Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia
- c. Pasal 71 Undang- Undang Pangan, yaitu Setiap orang yang terlibat Setiap dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupundari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin;
- d. Pasal 74 ayat (1) Undang- Undang Pangan, yaitu ; Pemerintah berkewajiban memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi Kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan;
- e. Pasal 75 huruf a, b, yaitu mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan;
- f. Pasal 86 ayat (1), yaitu Pemerintah menetapkan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;
- g. Pasal 86 ayat (2), yaitu Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;;
- h. Pasal 86 ayat (4), yaitu Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin kualitas pangan. Kewajiban bagi produsen untuk mematuhi ketentuan sanitasi, penggunaan bahan yang aman, serta tanggung jawab dalam setiap tahap proses produksi sangatlah penting. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, diharapkan pasar pangan akan semakin aman dan sehat, melindungi hak-hak konsumen serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Kemanan Pangan

Kemanan mutu dan gizi pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen Agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu, dan gizi pangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Dalam hal ini pada Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Kemanan Pangan terdapat ketentuan dijatuhkan kepada setiap orang yang mengedarkan:

- a. Pasal 41 ayat (1) yaitu Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.;
- b. Pasal 41 ayat (2) yaitu Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang;
- c. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- d. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- e. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan, pasal ini bertujuan melindungi konsumen dari bahaya penggunaan bahan substitusi yang dilarang dan berbahaya bagi yang mengkonsumsi.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu, dan gizi pangan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan setiap pihak yang terlibat dalam rantai pasokan pangan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Ini termasuk produsen, distributor, dan pengecer, yang semuanya berperan penting dalam menjaga standar keamanan dan kualitas pangan yang dikonsumsi oleh Masyarakat.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan adalah peraturan yang mengatur lebih rinci tentang ketentuan label pada pangan olahan yang dipasarkan di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan memastikan bahwa produk pangan olahan yang beredar memiliki label yang sesuai dengan standar, jelas, dan tidak menyesatkan, serta memberikan informasi yang diperlukan tentang kandungan, kualitas, dan keamanan produk, beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan:

a. Kewajiban Label pada Pangan Olahan

Setiap pangan olahan yang dipasarkan harus mencantumkan label yang jelas, lengkap, dan tidak menyesatkan. Label ini harus memberikan informasi yang cukup kepada konsumen mengenai produk pangan yang dibeli. Berikut adalah informasi wajib yang harus dicantumkan pada label:

- 1). **Nama Produk:** Nama pangan olahan yang jelas dan sesuai dengan jenis produk yang dimaksud.
- 2). **Daftar Bahan:** Daftar bahan baku yang digunakan dalam produk tersebut, dimulai dari bahan yang paling banyak digunakan hingga yang paling sedikit. Informasi ini sangat penting untuk konsumen yang memiliki alergi atau sensitivitas terhadap bahan tertentu.
- 3). **Informasi Gizi:** Setiap pangan olahan yang dikemas harus mencantumkan informasi gizi, termasuk : Energi (kalori), Lemak total, lemak jenuh, dan lemak trans, Karbohidrat total, termasuk gula, Protein, Natrium (garam), Vitamin dan mineral
- 4). **Berat Bersih atau Volume:** Menyebutkan berat atau volume produk yang dikemas dalam satuan yang mudah dipahami oleh konsumen.
- 5). **Tanggal Kedaluwarsa:** Menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa atau tanggal produksi, serta informasi penyimpanan produk yang benar.
- 6). **Nomor Izin Edar:** Nomor izin edar dari BPOM yang menandakan bahwa produk tersebut telah melalui pengujian dan evaluasi keamanan pangan

b. Peringatan Kesehatan

- 1). **Peringatan pada Bahan Berisiko:** Jika produk mengandung bahan tambahan pangan tertentu yang dapat berisiko bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan (misalnya, pemanis buatan, pengawet, pewarna, atau bahan kimia tertentu), maka label harus mencantumkan peringatan kesehatan yang jelas. Peringatan ini juga mencakup

bahan yang berisiko menyebabkan reaksi alergi pada sebagian orang, seperti kacang tanah, susu, atau gluten.

- 2). **Peringatan untuk Anak-Anak:** Produk yang ditujukan untuk anak-anak atau yang mungkin menarik minat anak-anak (misalnya, makanan manis) harus mencantumkan peringatan jika produk tersebut mengandung kandungan gula, garam, atau lemak yang tinggi

c. Label Halal dan Sertifikasi Lain

- 1). **Label Halal:** Produk yang disertifikasi halal harus mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi syarat kehalalan untuk konsumen Muslim.
- 2). **Sertifikasi Lain:** Selain label halal, produk pangan juga dapat mencantumkan sertifikasi lain yang relevan dengan kualitas atau keamanan produk, seperti sertifikasi organik, sertifikasi bebas gluten.

d. Penggunaan Bahasa dalam Label

- 1). **Bahasa Indonesia:** Label produk pangan olahan yang dipasarkan di Indonesia harus menggunakan **bahasa Indonesia** sebagai bahasa utama. Jika diperlukan, label boleh mencantumkan bahasa asing, tetapi bahasa Indonesia harus tetap tercantum jelas dan lebih menonjol.
- 2). **Klarifikasi Klaim:** Klaim yang digunakan dalam label, seperti "rendah kalori", "bebas lemak trans", "tinggi serat", atau "mengandung bahan alami", harus jelas dan tidak menyesatkan. Klaim tersebut harus dapat dibuktikan secara ilmiah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Bahan Tambahan Pangan

- 1). Pasal 13 ayat (2) Pasal ini secara tegas menyebutkan Bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bahan Baku; BTP; dan Bahan Penolong
- 2). Pasal 19 ayat (1) memuat aturan pencantuman Bahan Tambahan Pangan / BTP BTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf meliputi: BTP melalui penambahan langsung; dan/atau, BTP Ikutan (*Carry Over*)

Dalam label pangan olahan, semua BTP, baik yang ditambahkan langsung maupun yang terbawa (*carry over*), harus dicantumkan dengan jelas. Pencantuman ini harus dilakukan sesuai dengan nama bahan tambahan yang digunakan. Jika produk mengandung bahan yang merupakan BTP yang diatur oleh peraturan BPOM, maka label harus mencantumkan bahan tersebut. Label harus mencantumkan nama bahan tambahan dengan jelas, dan jika BTP tersebut memiliki potensi risiko bagi kesehatan, informasi yang jelas mengenai penggunaan BTP tersebut perlu dicantumkan

Badan Pengawas Obat Dan Makanan melarang perdagangan pangan yang tidak mencantumkan kandungan bahan yang seharusnya menjadi informasi yang tercantum pada label. Ketentuan ini dirancang untuk melindungi konsumen dari risiko mengonsumsi produk yang telah kehilangan kualitas dan keamanannya. Pangan yang tidak mencantumkan kandungan bahan sebenarnya berbahaya atau racun yang dapat mengakibatkan keracunan makanan, penyakit, atau bahkan kematian. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap pasal ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan pangan yang aman dan berkualitas. Sanksi yang berat diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak etis ini dan menjaga integritas pasar pangan.

Pedoman Label Pangan Olahan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) 2020

Berdasarkan Pedoman Label Pangan Olahan BPOM 2020, BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan dengan tujuan untuk mempengaruhi sifat atau karakteristik pangan tersebut, seperti meningkatkan rasa, memperpanjang umur simpan, atau memberikan

warna yang menarik. Penggunaan BTP harus memenuhi persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan oleh BPOM dan harus dicantumkan dengan jelas dalam label produk pangan olahan, Pedoman Label BPOM 2020 mengatur bahwa semua bahan tambahan pangan yang digunakan dalam produk pangan olahan harus dicantumkan dalam label produk tersebut dengan cara yang jelas dan dapat dipahami oleh konsumen. Berikut adalah beberapa hal penting yang diatur dalam pedoman ini terkait dengan BTP

a. Kewajiban Mencantumkan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Dalam Daftar Bahan

- 1). BTP harus dicantumkan dalam daftar bahan pada label produk pangan olahan. BTP tersebut harus tercantum dengan nama yang sesuai dan harus mencakup semua bahan tambahan yang digunakan, baik yang ditambahkan langsung maupun yang terbawa (*carry over*).
- 2). Daftar bahan harus disusun menurut urutan jumlah bahan yang paling banyak digunakan hingga yang paling sedikit.

b. Kategori Bahan Tambahan Pangan (BTP)

- 1). BTP yang Ditambahkan Langsung: BTP yang sengaja ditambahkan ke dalam produk untuk memberikan manfaat tertentu, seperti pengawet, pemanis buatan, pewarna, atau bahan pengental. contoh: Penggunaan sodium benzoat sebagai pengawet, aspartam sebagai pemanis buatan, atau tartrazin sebagai pewarna makanan.
- 2). BTP Ikutan (*Carry Over*): BTP yang tidak sengaja terbawa dalam produk dari bahan baku atau proses pengolahan. Meskipun BTP ini tidak ditambahkan secara langsung, namun tetap harus dicantumkan dalam label jika keberadaannya dalam produk cukup signifikan, contoh: Bahan tambahan yang terdapat dalam bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk pangan (seperti pengawet dalam bahan baku tepung)

Pada pedoman Label pangan BPOM yang paling mendekati perihal bahan substitusi adalah aturan pada poin 3.3.4 Tentang Bahan tambahan Pangan (BTP) dinyatakan sebagai berikut :

Bahan Tambahan Pangan (BTP), yang dicantumkan pada daftar bahan meliputi: BTP yang bersumber dari penambahan langsung dan BTP Ikutan (*carry over*)¹ Dimana yang wajib ada adalah pencantuman apakah ada antioksidan, pengawet atau pemanis buatan, dapat dilihat pada gambar berikut:

¹ Pedoman Label Pangan Olahan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) 2020

Contoh 1

Daftar bahan: tepung terigu, gula, lemak reroti, kakao bubuk, kakao massa, whey bubuk, pengembang, pengemulsi nabati.

Contoh 2

Daftar bahan: Sukrosa, maltodekstin, bubuk teh hijau (4%), bubuk teh hitam (1%), serbuk leci (1%), garam, perisa sintetik, pengatur keasaman, penstabil nabati, pemanis buatan aspartam dan asesulfam-K.

Contoh 3

Daftar bahan: Susu sapi segar, air, gula, susu skim bubuk, ekstrak pisang (5%), lemak susu, penstabil nabati, perisa sintetik, pewarna alami kurkumin CI 75300, premiks vitamin.

Contoh 4

Daftar bahan: air, gula, cokelat pelapis, susu skim bubuk, lemak nabati, cokelat bubuk, maltodekstrin, pengemulsi nabati, perisa sintetik, pewarna sintetik (Tartrazin CI 19140, Ponceau 4R CI 16255).

Contoh 5

Daftar bahan: air, gula, cokelat pelapis, susu skim bubuk, lemak nabati, cokelat bubuk, maltodekstrin, pengemulsi nabati, perisa sintetik stroberi, perisa sintetik vanila, pewarna sintetik (Tartrazin CI 19140, Ponceau 4R CI 16255).

Gambar 1. Pencantuman daftar bahan untuk BTP yang ditambahkan langsung

Sumber : Pedoman Label Pangan Olahan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM). 2020.

Pencantuman Label diatas pada pasal 3 mengacu kepada *Color Index (CI)* saja yaitu bahan pewarna buatan yang dipakai.

a. Peringatan pada BTP yang Berisiko

- 1). Jika bahan tambahan pangan yang digunakan berisiko atau memiliki potensi membahayakan kesehatan, label produk harus mencantumkan peringatan yang jelas. Ini berlaku untuk BTP yang dapat menimbulkan reaksi alergi atau efek samping pada sebagian konsumen.
- 2). Misalnya, pada produk yang mengandung sulfite (bahan pengawet yang dapat menyebabkan reaksi alergi), label harus menyebutkan "mengandung sulfite". Selain itu, jika produk mengandung bahan tambahan yang berisiko untuk kelompok tertentu (misalnya, anak-anak, ibu hamil), maka informasi peringatan atau batas konsumsi harus dicantumkan.

Sanksi Hukum Yang Dikenakan Kepada Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran Keamanan Produk Pangan

Pengaturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran konsumen dapat berbentuk tiga hal, yaitu:

- a. Sanksi administrasi Sanksi ini diatur dalam Pasal 60. Sanksi ini diberikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atas tugas dan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan (2) UUPK disebutkan bahwa sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa penetapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Sanksi Pidana Pokok Sanksi ini adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sanksi ini diatur dalam Pasal 62 UUPK dan dapat berbentuk pidana penjara atau pidana denda.
- c. Sanksi Pidana Tambahan Sanksi ini diatur dalam Pasal 63 UUPK. Adapun bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:
 - 1) Perampasan barang tertentu;
 - 2) Pengumuman keputusan hakim;
 - 3) Pembayaran ganti rugi;

- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen,
- 5) Pencabutan izin usaha

Berdasarkan jenis sanksi yang telah diuraikan, terlihat bahwa UUPK secara jelas mengatur berbagai bentuk sanksi untuk menjaga dan melindungi hak-hak konsumen. Salah satu aspek utama yang patut dicatat adalah penerapan sanksi pidana sebagai respons terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, pengenaan sanksi pidana pada pelanggaran terhadap hak konsumen menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi kriminal yang signifikan.

Penerapan sanksi pidana dalam UUPK -termasuk di Pasal 62 dan Pasal 63-menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak konsumen tidak hanya dianggap sebagai kesalahan administratif, melainkan juga sebagai tindakan yang merugikan masyarakat secara luas. Sanksi pidana berfungsi sebagai bentuk pengakuan terhadap seriusnya pelanggaran tersebut, yang dapat berdampak langsung pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Ini mencerminkan suatu paradigma bahwa perlindungan konsumen bukan hanya urusan hukum perdata, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, hukum pidana berperan sebagai sarana *social defence* yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama dalam memelihara ketertiban umum. Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan pelaku usaha akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan konsumen. Kriminalisasi terhadap pelanggaran hak konsumen juga dapat menjadi deterrent effect, atau efek pencegahan, bagi pelaku usaha lain agar tidak melakukan praktik serupa.

Dengan mengintegrasikan sanksi pidana dalam perlindungan konsumen, UUPK menciptakan suatu sistem hukum yang lebih komprehensif dan kuat. Perlindungan ini tidak hanya mencakup ganti rugi dan sanksi administratif, tetapi juga menambahkan lapisan keamanan tambahan melalui sanksi pidana. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada konsumen, karena mereka tahu bahwa ada konsekuensi hukum yang nyata bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak mereka. Secara keseluruhan, penerapan sanksi pidana dalam UUPK menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap perlindungan konsumen. Dengan mengakui bahwa pelanggaran terhadap hak konsumen dapat merugikan masyarakat secara luas, undang-undang ini berusaha untuk menciptakan iklim usaha yang lebih etis dan bertanggung jawab. Melalui penegakan hukum yang tegas, diharapkan setiap individu dan entitas yang terlibat dalam kegiatan usaha akan beroperasi dengan lebih transparan dan menghormati hak-hak konsumen, sehingga tercipta lingkungan yang lebih baik bagi semua pihak.

Sanksi pidana dalam kerangka hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya hak-hak konsumen. Di samping itu, terdapat sanksi perdata (Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) UUPK) serta sanksi administrasi negara (Pasal 8 ayat (4) UUPK) yang berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam konteks ini, hukum pidana dalam UUPK akan diaktifkan hanya ketika instrumen hukum lainnya terbukti tidak efektif dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, sanksi pidana menjadi pilihan terakhir untuk menegakkan kepatuhan dan menjamin hak-hak konsumen.

Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Sanksi Hukum Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat dikenakan terhadap individu atau badan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- a. Pasal 147 ayat (1) yaitu Setiap Orang yang memproduksi makanan dan minuman dilarang memberikan informasi atau pernyataan yang tidak benar dan/ atau menyesatkan pada informasi produk;
- b. Pasal 147 ayat (2) yaitu Setiap Orang dilarang mempromosikan produk makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan informasi produk;
- c. Pasal 147 ayat (3) yaitu Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pasal 148 yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 147.

Tindakan administratif untuk menjamin hal ini dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat Gubernur, Bupati/Walikota, atau Kepala Badan terkait, dan meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis kepada pelaku usaha terkait pelanggaran yang ditemukan.
- b. Larangan sementara untuk mengedarkan produk pangan dan/atau perintah menarik produk dari peredaran.
- c. Pemusnahan pangan yang terbukti membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.
- d. Penghentian sementara produksi pangan yang dianggap berisiko.
- e. Pengenaan denda dengan jumlah denda diatur pada aturan pelaksana
- f. Pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran, atau sertifikat produksi pangan dari industri rumah tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, produsen yang melanggar aturan terkait kemasan dan label pangan dapat dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, atau sanksi perdata, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau pencabutan izin edar, atau denda administratif. Jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan keselamatan atau menyesatkan konsumen, maka pelaku bisa dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda. Pasal 143 dan Pasal 144 dari Undang – Undang no 18 Tahun 2012 ini menyatakan bahwa produsen atau pihak yang bertanggung jawab atas pangan yang tidak memenuhi persyaratan kemasan dan pelabelan yang jelas dan benar bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp 10 miliar.

Pasal 143 mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan terkait dengan keamanan pangan. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengedarkan, atau menyimpan pangan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan konsumen dapat dikenakan hukuman pidana.

Isi Pasal 143:

- a. Ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan pangan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Ayat (2): Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian atau gangguan pada kesehatan, maka sanksi dapat ditingkatkan, yang menunjukkan bahwa peraturan ini bertujuan melindungi konsumen dari pangan yang tidak aman.

Pasal 144 (Pelanggaran Terhadap Label dan Iklan Pangan)

Pasal 144 mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran yang berkaitan dengan label dan iklan pangan, terutama jika label atau iklan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau menyesatkan konsumen.

Isi Pasal 144:

- a. Ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja mencantumkan label atau iklan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang dapat menyesatkan konsumen, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Ayat (2): Pelanggaran ini dapat merujuk pada pencantuman informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap mengenai bahan baku, kandungan gizi, tanggal kedaluwarsa, atau klaim yang tidak terbukti.

Sanksi yang diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 144 ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa pangan yang beredar di pasar, sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda yang besar bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang dengan sengaja melanggar aturan yang telah ditetapkan, baik itu terkait dengan keamanan pangan maupun informasi pada label dan iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan memenuhi standar keamanan, kualitas, dan informasi yang benar. Hal ini sangat penting agar pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak membahayakan kesehatan dan memberikan informasi yang jelas serta tidak menyesatkan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan diatur untuk memastikan bahwa produk pangan olahan yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan, transparansi, dan informasi yang jelas bagi konsumen. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai pencantuman label pada produk pangan olahan, termasuk informasi tentang bahan, bahan tambahan pangan (BTP), tanggal kedaluwarsa, dan klaim kesehatan, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

a. Pasal 71 ayat (1) yaitu setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Badan ini dikenai sanksi administratif berupa:

- a). penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- b). penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; dan/atau
- c). pencabutan izin

b. Pasal 71 ayat (2) yaitu Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Banyaknya pangan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai sudah meresahkan. Perdagangan pangan yang tidak sesuai takaran kesehatan, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi pangan atau pembuatan-pembuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan atau melalui iklan. Label dan iklan pangan yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan lahir sebagai respons terhadap meningkatnya masalah dalam perdagangan pangan di masyarakat, di mana banyak produk beredar tanpa mematuhi ketentuan pencantuman label yang jelas dan akurat. Fenomena ini telah menimbulkan keresahan, terutama terkait dengan kesehatan konsumen, di mana pangan yang tidak sesuai dengan takaran kesehatan, penggunaan bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi pangan, dan praktik penipuan lainnya dapat membahayakan kesehatan, terutama pada anak-anak.

Label dan iklan pangan yang tidak jujur atau menyesatkan berpotensi merugikan perkembangan kesehatan manusia secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peraturan tersebut menegaskan kewajiban produsen untuk mencantumkan bahan dasar makanan secara transparan, guna memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang benar

mengenai apa yang mereka konsumsi. Selain itu, perdagangan pangan yang dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab menjadi sangat penting, tidak hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap produk yang beredar. Dengan pengaturan yang tepat dan penerapan sanksi hukum yang berat terhadap pelanggar, diharapkan setiap pihak yang memproduksi atau mengedarkan pangan dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas, mendapatkan perlindungan, dan memberikan jaminan kepastian hukum. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih aman, di mana konsumen merasa terlindungi dan produsen bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pangan yang beredar di masyarakat.

KESIMPULAN

Pengawasan terhadap aturan pencantuman kandungan bahan substitusi dalam pangan kemasan merupakan salah satu faktor kunci yang memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap peredaran pangan kemasan di pasar, terutama dalam konteks keamanan dan kualitas produk. Berdasarkan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan, Peraturan Pemerintah Tentang Keamanan Pangan, serta aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jika dilihat dari peraturan yang berlaku di Indonesia pengawasan sudah cukup baik, namun jika mengacu kepada banyak peraturan keselamatan pangan Internasional jelas aturan Hukum di Indonesia banyak yang belum menjangkau terhadap pengawasan pangan yang lebih detail terutama dalam petunjuk teknis pencantuman label bahan substitusi yang belum ada di dalam aturan yang berlaku Indonesia.

Upaya pemerintah untuk terus memperbaharui aturan pencantuman Label bahan substitusi cukup terlihat dari di update dan diperbaharuinya aturan pelabelan bahan substitusi tetapi seperti agak lambat merespons kebutuhan informasi masyarakat atas kandungan tiap bahan pangan kemasan yang dijual di Indonesia, apalagi di era percepatan investasi setelah tahun 2022 dimana banyak produsen makanan kemasan yang mulai mengadopsi bahan substitusi pangan dalam membuat produk makanan dan minuman kemasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, T., & Purnamasari, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Kosmetika Ilegal Hb Whitening Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 1365–1375.
- Kusumawardani, H. D., Riyanto, S., Setianingsih, I., Puspitasari, C., Juwantoro, D., Harfana, C., & Ayuni, P. D. (2018). Kandungan Gizi, Organoleptik Dan Umur Simpan Biskuit Dengan Substitusi Tepung Komposit (Daun Kelor, Rumput Laut Dan Pisang). *Media Gizi Mikro Indonesia*, 9(2), 123–138.
- Lubis, A. R., & Tarina, D. D. Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Mengonsumsi Obat Sirup Yang Merusak Kesehatan. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 988–1004.
- Maulana, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Perusahaan Di Kota Makassar. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 151–156.
- Mewu, M. Y. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 441–450.
- Pandie, P. M. P., & Aloysius, S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pencantuman Label Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

- Perlindungan Konsumen. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(1), 160–176.
- Priaji, S. A. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen.
- Putri, A., & Mula, A. (2024). Peningkatan Perlindungan Konsumen Terhadap Kecantikan Berbahaya Di Semarang: Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dan Peran Pemerintah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (Jihhp)*, 4(6).
- Putri, H. I. (2023). Perlindungan Konsumen Tentang Kedudukan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jasa Pengiriman Barang. Universitas Islam Kalimantan Mab.
- Ratiwi, R., Anggriani, R. A., Mawati, W. A., & Hasan, Z. (2024). Pengaruh Kepercayaan Konsumen Dan Transparansi Transaksi Dalam Jual Beli Syariah Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 5(9), 137–147.
- Safitri, T. I. (2019). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan (Studi Pada Pelaku Usaha Keripik Pisang Di Bandar Lampung).
- Simanjuntak, A. (2018). *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis*.
- Sinulingga, N. A. B., Sihotang, H. T., & Kom, M. (2023). *Perilaku Konsumen: Strategi Dan Teori*. Iocs Publisher.
- Sumarno, E., & Susilo, W. (2022). Perjanjian Kerjasama Bpjs Kesehatan Cabang Kota Probolinggo Dengan Rumah Sakit Ibu Dan Anak Amanah Terkait Hak Dan Kewajiban Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Ius: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9(01), 24–31.
- Utama, Y. P. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online. Universitas Islam Kalimantan Mab.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.